



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2021 – 2026



BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah swt Tuhan yang Maha Esa Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 dapat kami selesaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Serta berpedoman kepada Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 050/662/II/Bapplitbang Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD).

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai Tugas penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

Atas dasar itulah maka Rencana Strategis (Renstra) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 disusun agar dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas selanjutnya. Selain itu kepada seluruh Tim Penyusun Renstra di Lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat maupun unit lainnya yang terlibat dan memberikan masukan di dalam Proses Penyusunan Renstra ini, Kami ucapkan banyak terima kasih.

Plt. KEPALA BIRO,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

AHMAD PAHRUKA, S.Pd., M.MP
Pembina
NIP. 197302121999091001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah	II-1
2.2. Sumber Daya Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah	II-5
2.3. Kinerja Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah	II-7
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah	II-7
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah	III-1
3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-5
3.3. Telaahan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Kabupaten/Kota	III-9
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-10
3.5. Penentuan Isu–Isu Strategis	III-12
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah	IV-1

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

Bab I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Didalam RENSTRA tersebut memuat tentang Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

Oleh karena itu dalam rangka upaya mendukung Visi, Misi dan Program Kerja Gubernur Kalimantan Tengah masa jabatan 2016-2021 dan berpedoman pada rancangan awal RPJMD khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsive dalam rangka percepatan pembangunan daerah, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Tahun 2021-2026.

Renstra-PD tersebut disusun menurut Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 27 tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Perencanaan Strategis merupakan sarana yang sekaligus kebutuhan nyata untuk mengatasi baik intern maupun ekstern sebagaimana persoalan yang dihadapi dalam era globalisasi saat ini. Rencana tersebut diharapkan akan merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran Biro Kesejahteraan Rakyat Setda

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan tata kerja organisasi.

Didalam Rencana Strategis terkandung visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan, program dan kegiatan dimasa mendatang. Proses perencanaan strategis ini bertitik tolak kepada orientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala (kelemahan dan ancaman/tantangan) yang ada, atau mungkin akan timbul. Untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, sangat diperlukan integritas antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dalam arti luas.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang- Undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang- Undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Undang- Undang No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden No 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonmor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah ;

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah sebagai dasar bagi semua stakeholder, pimpinan dan seluruh aparatur di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan Penyusunan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

- a. Mengetahui kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah dimasa lalu, permasalahan dan isu strategis, sasaran strategis dan bagaimana upaya pencapaiannya dalam lima tahun mendatang;
- b. Memandu perencanaan pembangunan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang berkelanjutan;
- c. Sebagai instrumen bagi pihak-pihak yang bertugas melaksanakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi program dan kegiatan;
- d. Memberikan arah dan pedoman dalam rangka melaksanakan program kerja dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
- e. Sebagai alat kendali dalam rangka akuntabilitas dan penilaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan;** berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Gambaran Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;** berisi Gambaran Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Sumber Daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
- BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;** berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, Telaahan visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, Telaahan Renstra Setjen Kemendagri, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
- BAB IV Tujuan dan Sasaran;** berisi rumusan tujuan dan sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah beserta indikator kerjanya.
- BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan;** berisi rumusan strategi dan arah kebijakan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;** berisi rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif.
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;** berisi mengenai Indikator Kinerja, Kondisi Awal Kinerja, dan Kondisi Akhir Kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.
- BAB VIII Penutup;** berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kalimantan Tengah Tahun 2021–2026 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Bab 2

GAMBARAN PELAYANAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah

a. Tugas Pokok

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai Tugas penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat non Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
- b. Penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat non Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;

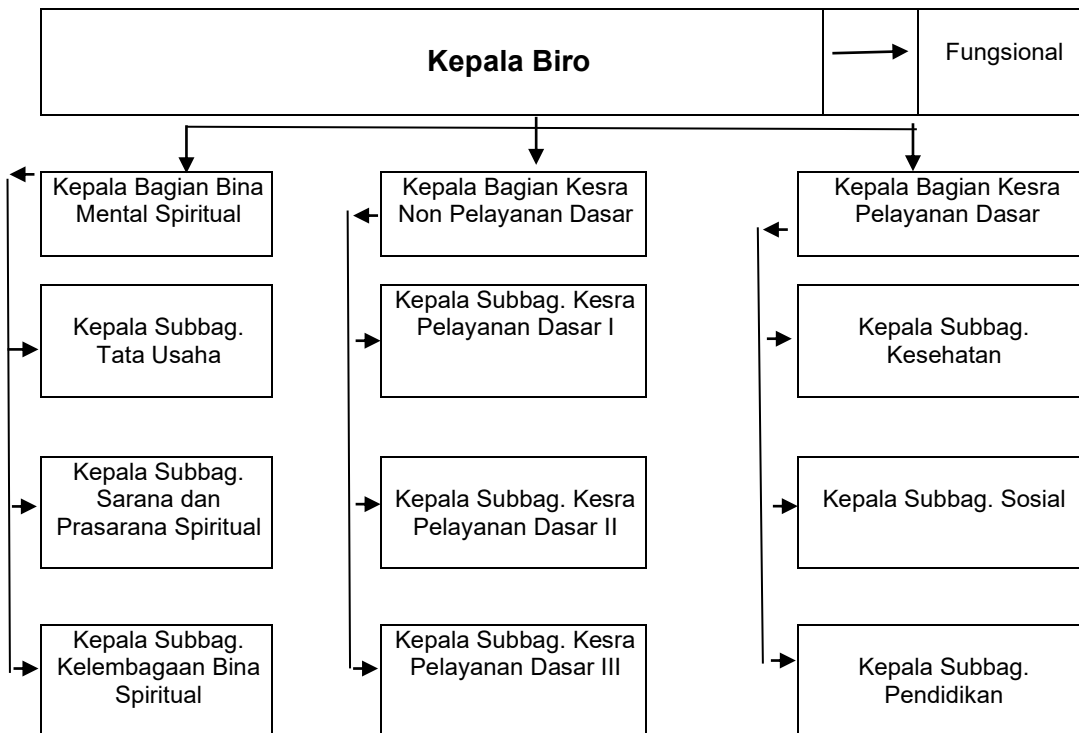
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat non Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari :

- 1. Kepala Biro dengan jabatan eselon II.b
- 2. Kepala Bagian dengan jabatan eselon III.a
 - a. Bagian Bina Mental Spiritual terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha (eselon IV.a)
 - 2. Sub Bagian Sub Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual (eselon IV.a)
 - 3. Sub Bagian Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual (eselon IV.a)
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1. Sub Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar I (eselon IV.a)
 - 2. Sub Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar II (eselon IV.a)
 - 3. Sub Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar III (eselon IV.a)
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1. Sub Bagian Kesehatan (eselon IV.a)
 - 2. Sub Bagian Sosial (eselon IV.a)
 - 3. Sub Bagian Pendidikan (eselon IV.a)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Biro Kesejahteraan Rakyat didukung oleh 42 personil yang terdiri dari 1 Kepala Biro, 3 Kepala Bagian, 6 Kepala Sub Bagian, 1 Pejabat Fungsional dan 31 Orang Pelaksana dengan struktur organisasi dan personalia sebagaimana tercantum dalam struktur di bawah ini :

Gambar 2.1.
STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



2.2. Sumber Daya Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Data Kepegawaian dan Barang Milik Daerah yang dimiliki Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah diklasifikasikan kedalam jenjang minimal SLTP atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan jenjang paling puncak yaitu jenjang Sarjana S3. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di tabel 2.2

Tabel 2.2.1.a
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	0	0	0	
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	7	8	15	*)
3	Diploma Satu (D-1)	0	0	0	
4	Diploma Tiga (D-3)	1	0	1	
5	Sarjana (S-1)	10	11	21	*)
6	Sarjana (S-2)	3	2	5	
7	Sarjana (S-3)	0	0	0	
	Jumlah	21	21	42	

Keterangan: *) termasuk Pegawai kontrak berjumlah 15 orang terdiri 9 orang Laki-laki dan 6 orang perempuan.

Dari jumlah pegawai sebanyak 42 orang ini kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan.

Tabel 2.2.1.b
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	I/d Juru Muda	0	0	0	
2	II/a Pengatur Muda	3	3	6	*)
3	II/a Pengatur Muda	0	0	0	

4	II/b	Pengatur Muda Tk. I	1	0	1	
5	II/c	Pengatur	2	1	3	
6	II/d	Pengatur Tk. I	1	3	4	
7	III/a	Penata Muda	1	0	1	
8	III/a	Penata Muda	6	3	9	*)
9	III/b	Penata Muda Tk.I	3	1	4	
10	III/c	Penata	1	5	6	
11	III/d	Penata Tk. I	0	5	5	
12	IV/a	Pembina	0	0	0	
13	IV/b	Pembina Tk. I	3	3	3	
14	IV/c	Pembina Utama Muda	0	0	0	
15	IV/e	Pembina Utama	0	0	0	
	Jumlah		21	21	42	

Keterangan: *) Pegawai kontrak/honorar.

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban pegawai. Seperti kita lihat di tabel 2.3 jabatan eselon II ke bawah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.c
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktur dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
1	Eselon I	0	0	0
2	Eselon II.b	0	0	0
3	Eselon III.a	3	0	3
4	Eselon IV.a	0	6	6
5	Fungsional	1	0	1
6	Non Struktural / Fungsional	17	15	32
	Jumlah	21	21	42

2) Aset

Aset yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah merupakan peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat dilihat pada tabel KIB berikut ini :

2.3. Kinerja Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Kinerja pelayanan didasarkan pada Program Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak terlepas dari program kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional yang disusun guna membantu Gubernur dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

Implementasi dan aplikasi dari Tupoksi tersebut diwujudkan kedalam program dan kegiatan yang secara umum berorientasi kepada tercapainya target realisasi kegiatan. Oleh karena itu Program Strategis secara umum, mengutamakan usaha untuk menempatkan kegiatan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

Menuju arah yang diinginkan tersebut di atas, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan koordinasi, interaksi dengan PD dan Stakeholders terkait. Koordinasi dan interaksi dapat berupa pelayanan dalam bentuk melakukan pembinaan, pengendalian dan memfasilitasi jalannya kegiatan yang dikelola oleh Stakeholders tersebut. Selain itu program dan kegiatan yang dikelola PD dan Stakeholders terkait agar mencapai sasaran, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah juga melaksanakan pelaporan dan evaluasi sebagai bentuk tanggungjawab kepada Gubernur.

Mencapai hal tersebut di atas perlu didukung oleh kondisi internal Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang solid, hal ini mengingat adanya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja personil dalam penyelenggaraan tugas selain faktor yang berasal dari dalam sendiri. Untuk itu Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah akan lebih memperhatikan efisiensi dan efektifitas serta disiplin kerja untuk menuju keberhasilan pencapaian kinerja. Selain itu juga perlu didukung oleh :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Membentuk pola pikir dan budaya kerja pada organisasi;
3. Perlu adanya komitmen yang kuat dengan OPD dan Stakeholders dalam pelaksanaan kegiatan yang saling bersinergi;
4. Perlunya meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kerja.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah, banyak hal dapat diaplikasikan untuk melakukan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar. Namun di dalam pelaksanaannya untuk mencapai keberhasilan pembangunan secara optimal tidaklah mudah, ada banyak tantangan yang mesti dihadapi, baik dengan PD pelaksana kegiatan, juga berasal dari masyarakat.

Dari tantangan yang ada, sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah (Gubernur), Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah tidak akan terpaku hanya pada tantangan belaka, tapi tetap eksis dengan membuka peluang melakukan pengembangan pelayanan.

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dari Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

➤ Tantangan

1. Besarnya tuntutan masyarakat akan peran pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah-masalah kesejahteraan masyarakat, kebudayaan, pembinaan pemuda dan olahraga serta agama yang belum diikuti dengan peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pelayanan secara optimal, disebabkan oleh berbagai kendala dan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, baik dari segi pembiayaan, sarana dan prasarana maupun sumberdaya manusia.
2. Penanganan terhadap berbagai masalah mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, perlu diselenggarakan secara komprehensif, melalui sinergi berbagai program pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat aktif.
3. Memfasilitasi untuk mencari solusi permasalahan yang ada antara PD dengan PD di Provinsi, antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota, antara PD dengan masyarakat;

➤ **Peluang**

1. Meningkatkan kompetensi organisasi dengan menyertakan para personil mengikuti pelatihan teknis dan fungsional serta pelatihan khusus yang mendukung tupoksi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi program/kegiatan baik dalam lingkup Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan Pemerintah Pusat.
3. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang sangat diprioritaskan bagi masyarakat dan sangat berpotensi terjadinya permasalahan.

Bab 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi dalam mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan strategis, maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis yaitu dengan teknik analisis SWOT (*strength, weaknesses, opportunity, and threat*), yaitu merupakan teknik analisis untuk mengidentifikasi kondisi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), serta faktor eksternal (peluang dan ancaman).

Dari permasalahan tersebut akhirnya dapat disusun Tujuan dan Sasaran dari Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan kondisi terkini dapat kami sampaikan permasalahan yang ada sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

1. Banyaknya kegiatan bidang Kesejahteraan Rakyat yang harus ditunda karena pandemi Covid 19.
2. Kurangnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan bidang Kesejahteraan Rakyat.
3. Kurangnya kompetensi pengembangan sumber daya manusia dalam mendukung bidang Kesejahteraan Rakyat.

Ditinjau dari lingkungan internal, terdapat beberapa kekuatan yang dapat menjadi pendorong terwujudnya kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda

Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain :

- ✓ Adanya Political Will dari Gubernur dan DPRD;
- ✓ Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas;
- ✓ Komitmen pimpinan untuk melaksanakan tugas dengan baik;
- ✓ Kualitas dan kuantitas personil cukup memadai;
- ✓ Ketersediaan dana dan fasilitas/Peralatan kantor cukup memadai;
- ✓ Eksistensi Biro Kesejahteraan Rakyat yang strategis.

Sebaliknya terdapat beberapa kelemahan yang dapat menjadi penghambat atau permasalahan sehingga perlu diminimalisir supaya menjadi pendukung terwujudnya kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain :

- ✓ Rendahnya Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- ✓ Belum efektifnya Koordinasi dan Fasilitasi;
- ✓ Terbatasnya Data dan Informasi.

Ditinjau dari lingkungan eksternal, terdapat beberapa peluang yang perlu dimanfaatkan guna mewujudkan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain :

- ✓ Pesatnya Perkembangan IPTEK;
- ✓ Motivasi kerja yang cukup tinggi.
- ✓ Program/kegiatan didukung oleh pemerintah;

Sebaliknya terdapat beberapa Hambatan dari lingkungan eksternal yang perlu diantisipasi dalam terwujudnya kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain :

- ✓ Adanya pandemi Covid-19 yang di alami oleh Bangsa Indonesia;
- ✓ Penempatan PNS/pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensinya;
- ✓ Pihak luar kurang mengetahui eksistensi Biro Kesejahteraan Rakyat;
- ✓ Lembaga luar sering lebih berkompeten dalam melaksanakan kegiatan internal.

Setelah hasil analisis SWOT dilakukan yang menghasilkan faktor-faktor internal (kekuatan / *Strengths* dan kelemahan / *Weaknesses*) dan eksternal (peluang / *Opportunities* dan Ancaman / *Threats*), maka berdasarkan hasil tersebut digunakan untuk menentukan strategi-strategi, yaitu :

1. Strategi SO dengan mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk mengambil manfaat dari peluang

(O) yang ada.

2. Strategi WO yaitu mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan peluang (O) untuk mengatasi kelemahan (W) yang ada.
3. Strategi ST yaitu dengan mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk menghindari ancaman (T).
4. Strategi WT yaitu dengan mengembangkan suatu strategi dalam mengurangi kelemahan (W) dan Menghindari ancaman (T).

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor SWOT diatas ditetapkan strategi-strategi seperti dibawah ini :

Faktor- faktor Internal Faktor-faktor Eksternal	(S) <i>Strengths</i> /Kekuatan	(W) <i>Weaknesses</i> /Kelemahan
(O) <i>Opportunities</i> /Peluang	STRATEGI SO : Mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk mengambil manfaat dari peluang (O) yang ada.	STRATEGI WO : Mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan peluang (O) untuk mengatasi kelemahan (W) yang ada.
(T) <i>Threats</i> /Ancaman	STRATEGI ST : Mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk menghindari ancaman (T)	STRATEGI SO : Mengembangkan suatu strategi dalam mengurangi kelemahan (W) dan menghindari ancaman (T).

3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI

Sesuai dengan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, **Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026**, adalah :

" KALIMANTAN TENGAH MAKIN BERKAH "
(BERMARTABAT, ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH, DAN HARMONIS)

Penjelasan dari Visi ini adalah :

Bermartabat : Kalimantan Tengah yang makin unggul, berdaya saing tinggi, dan memiliki reputasi cemerlang.

Elok : Kalimantan Tengah yang makin indah dan menawan secara tata ruang kewilayahan serta berorientasi Green kalteng (Kalteng Hijau), disertai perilaku masyarakat yang ramah.

Religius : Kalimantan Tengah yang makin taat dalam melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan individu maupun public demi Kalteng yang berkarakter.

Kuat : Kalimantan Tengah yang kuat secara ekonomi, sejahtera lahir dan batin. Kalteng sehat, mandiri, Tangguh, dan maju dalam berbagai sector.

Amanah : Kalimantan Tengah yang berintegritas, jujur, dan penuh dedikasi. Komitmen dan konsisten dalam menjaga dan melindungi seluruh warga Kalteng.

Harmonis : Hidup rukun antar sesama warga dengan latar belakang kemajemukan secara agama, etnik, dan antargolongan dalam suasana saling menghormati dan menghargai demi keberkahan Bersama.

MISI

Dalam mewujudkan visi Kalimantan Tengah Makin Berkah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan misinya sebagai berikut :

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan

- ✓ Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dalam rangka menopang aktivitas ekonomi yang produktif dan kreatif;
- ✓ Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berorientasi perluasan ketenagakerjaan dibidang manufaktur, termasuk pengembangan sentra industry tapioca dan Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit (SISKA);
- ✓ Menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan melalui penguatan sector pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakan, perikanan, dan kelautan;
- ✓ Mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan (ecotourism) melalui peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan, optimalisasi promosi potensi wisata dalam Kalteng;
- ✓ Merawat dan melestarikan hutan rawa gambut;

- ✓ Menuntaskan infrastruktur kelistrikan melalui pemanfaatan biodiesel, tenaga surya, dan energi alternative lainnya;
- ✓ Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi, industry kreatif, kredit usaha rakyat (KUR) melalui pendampingan, promosi, dan pemasaran produk;
- ✓ Memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan kewajiban menggunakan plat KH secara tegas dan massif, termasuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang mengutamakan dari penyalur yang mempunyai kantor dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kalteng;
- ✓ Memperkuat konektivitas antarwilayah melalui pembangunan jembatan, jalan, jalur kereta api, bandara internasional, dan pelabuhan laut.

2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global

- ✓ Memfasilitasi pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan, dan pusat-pusat kebudayaan beserta penguatan tokoh lintas agama sebagai penggerak peradaban dan pilar pembentuk kemajemukan;
- ✓ Melakukan pendampingan terhadap Komunitas Adat untuk memperoleh pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat;
- ✓ Memperkuat masyarakat tahan bencana melalui mitigasi dan manajemen kebencanaan termasuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak covid-19;
- ✓ Menciptakan Kalteng sebagai zona bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), narkoba, konflik dan ekstrimisme dengan memperkuat nilai-nilai agama dan kearifan local;
- ✓ Memantapkan kolaborasi dan kebersamaan lintas sectoral antara pemerintah, dunia usah, dan masyarakat sipil yang berorientasi pada perwujudan Kalteng yang aman, tertib, dan Tangguh dari berbagai tantangan global;
- ✓ Mempercepat pengembangan Kawasan food estate dan penguatan ekonomi kerakyatan yang mengutamakan potensi dan keunggulan local.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi

- ✓ Membentuk birokrasi pemerintahan yang inovatif, transparan, dan kolaboratif melalui pemanfaatan teknologi yang berdampak positif bagi kinerja aparatur dan kualitas pelayanan public (smart government);
- ✓ Mendorong budaya birokrasi pemerintahan yang responsive terhadap kebutuhan warga melalui pelayanan terpadu dan perluasan partisipasi public;
- ✓ Meningkatkan fungsi tata ruang wilayah provinsi;
- ✓ Menjamin kepastian hukum dan reformasi birokrasi yang berorientasi penguatan iklim investasi yang efektif dan efisien melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), menuju penyelenggaraan mall pelayanan public;
- ✓ Mendorong kemudahan berinvestasi melalui jaminan rasa aman, proses perijinan yang mudah dan birokrasi pemerintahan yang tangkas.

4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing

- ✓ Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui tunjangan beasiswa untuk warga kurang mampu, termasuk pengiriman putra putri daerah berprestasi untuk kuliah keluar daerah Kalteng hingga Luar Negeri;
- ✓ Menyediakan layanan Pendidikan khusus untuk wilayah terpencil, terbelakang, atau di daerah perbatasan dengan penempatan tenaga pendidik yang berkompeten disertai jaminan kesejahteraan dan peningkatan sarana maupun prasarana Pendidikan yang memadai;
- ✓ Mengembangkan Pendidikan vokasi tingkat menengah dan tinggi sesuai kebutuhan di dunia kerja agar produktif dan berdaya saing tinggi;
- ✓ Memperkuat daya saing pemuda dan pelatihan olahragawan potensial melalui peningkatan fasilitas yang memadai agar dapat berkompetensi dalam skala nasional maupun internasional;
- ✓ Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, biaya gratis bagi pasien kurang mampu dan pengadaan kuantitas maupun kualitas fasilitas kesehatan beserta pengiriman dokter-dokter ke pelosok desa.

5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

- ✓ Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan local Huma Baetang (Rumah Besar);
- ✓ Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalteng yang beriman, pancasilais dan cinta damai;
- ✓ Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;
- ✓ Memperluas partisipasi perempuan sebagai pejabat public yang berorientasi kesetaraan gender;
- ✓ Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.

PROGRAM PRIORITAS

➤ Kalteng Bermartabat

Perencanaan pembangunan dan strategi kebijakan yang berorientasi pemberdayaan keunggulan local berbasis kearifan budaya dalam rangka meneguhkan Kalteng yang Belum Bahadat (hidup beradat) melalui program :

- ✓ meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan termasuk menebus keterisolasian daerah pedalaman dan pesisir.
- ✓ Memperluas sosialisasi di berbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjiwai spirit Belum Bahadat (hidup beradat) dalam berkompetisi di berbagai bidang guna menumbuhkan masyarakat Kalteng yang berdaya saing.

➤ Kalteng Elok

Konservasi Kawasan hutan lindung, pencegahan maupun penanganan kebakaran lahan, hutan rawa gambut dan penataan ruang berwawasan lingkungan melalui program :

- ✓ Meningkatkan sertifikasi lahan masyarakat adat dan pengembangan ekonomi hijau;

- ✓ Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata lintas kab/kota, termasuk menjadikan lahan gambut dan hutan rawa terbesar di Indonesia sebagai ecotourism berkelas dunia.

➤ **Kalteng Religius**

Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat sebagai pilar pembentukan karakter masyarakat Kalteng melalui program:

- ✓ memperluas pengiriman tokoh-tokoh lintas agama dalam rangka perjalanan wisata religi misalnya para kyai dan ustadz naik haji dan umroh ke Mekkah, pendeta ziarah rohani ke Yerusalem, Hindu Kaharingan ke India;
- ✓ meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru ngaji, sekolah minggu dan guru spiritual di berbagai agama dan keyakinan masing-masing.

➤ **Kalteng Kuat**

Pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan, peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan kesehatan melalui program

- ✓ Mempercepat pengembangan kawasan food estate sebagai penunjang cadangan logistic strategis untuk pertahanan negara, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan local;
- ✓ Mempercepat program afirmatif dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19 dan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap bencana;
- ✓ Memperluas kuantitas dan kualitas penerima beasiswa Kalteng Berkah yang selama ini telah berjalan;
- ✓ Memastikan fasilitas dan layanan akses kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat melalui perawatan khusus secara gratis bagi pasien kurang mampu.

➤ **Kalteng Amanah**

Peningkatan SDM aparatur birikrasi yang inovatif demi pelayanan public yang cepat dan tepat melalui program :

- ✓ Membuka ruang seluas-luasnya kepada kalangan professional untuk menduduki jabatan public sesuai kapasitas dan kompetensinya;
- ✓ Mengoptimalkan penerapan e-government dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public secara efektif dan efisien;
- ✓ Meningkatkan kapasitas SDM aparatur birokrasi pemerintahan melalui Pendidikan dan pelatihan khusus;

- ✓ Meningkatkan insentif khusus bagi ketua RT/RW, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang penuh dedikasi dan loyalitas.

➤ **Kalteng Harmonis**

Penguatan toleransi, etika berwarganegara, kesadaran multicultural, pluralisme dan kemajemukan serta kerukunan antar umat beragama, suku maupun antargolongan melalui program :

- ✓ Memperkuat falsafah Huma Betang dalam kehidupan beragama, berbudaya dan bermasyarakat melalui pemberdayaan budayawan dan tokoh-tokoh adat;
- ✓ Menerbitkan peraturan dan hukum adat sebagai instrument untuk meneguhkan peradaban masyarakat yang tertib;
- ✓ Mengedepankan hokum adat dan pendekatan kebudayaan dalam mengatasi persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat;
- ✓ Memperkuat kelembagaan adat sebagai agen kebudayaan yang terkonsolidasi dalam rangka meningkatkan partisipasi pembangunan berdimensi kearifan lokal.

3.3 Telaahan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian dalam Negeri dan Renstra Kabupaten/Kota

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas, serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kementerian, sebagaimana visinya yang diarahkan untuk membawa Sekretariat Jenderal Kementerian dalam Negeri menjadi suatu organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Kata kunci dalam rangka mewujudkan Setjen Kemendagri sebagai organisasi yang mampu meberikan pelayanan prima menuju tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri adalah :

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governace), merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik antara lain : Akuntabilitas, Pengawasan, Daya tanggap, Profesionalisme, Efiseiensi dan efektifitas, Transparani, Kesetaraan, Wawasan ke depan, Partisipasi, dan

Penegakan Hukum.

Pelayanan Prima, merupakan suatu dedikasi pemberian pelayanan secara baik dan berkualitas yakni pelayanan secara profesional, sesuai kebutuhan, transparan, dan terukur dari segi waktu, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan tanggung gugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik didefinisikan bahwa "*Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik*".

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, merupakan penyelenggaraan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut azas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dilakukan dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, serta bertujuan untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.

Mencermati ketiga kata kunci di atas, dalam rangka mewujudkan pelayanan prima menuju tatakelola pemerintahan yang baik dalam mendukung tugas dan fungsi Kemendagri dimaksud, seluruh unit kerja dilingkungan Setjen harus mampu bekerja secara optimal. Mengingat tugas dan fungsinya yang strategis tersebut, visi Setjen ini perlu dijabarkan ke dalam misi, tujuan dan sasaran yang secara hirarkis saling berkesinambungan untuk pencapaian visi dimaksud.

Mengacu pada Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi. Rumusan Misi yang diangkat di dalam Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian dalam Negeri untuk lima tahun kedepan, yaitu :

1. Memanfaatkan pengelolaan perencanaan dan kerjasama luar negeri lingkup Kementerian Dalam Negeri yang berbasis kinerja, bermanfaat dan terukur.
2. Memantapkan organisasi dan kepegawaian Kementerian Dalam Negeri yang efektif, efisien dan prosioan, dengan didukung oleh SDM aparatur yang profesional dan bebas KKN;

3. Memantapkan produk hukum dan kebijakan Kemendagri dan Pemerintah Daerah secara berdaya guna dan dapat dipertanggung jawabkan
4. Memantapkan kualitas informasi dan kehumasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri secara aktual dan terpercaya dengan sistem layanan dan akses informasi berbasis *e-government*.
5. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset, serta standar pelayanan umum di lingkungan Kemendagri secara berkualitas dan memadai

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

Peran Perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif.

Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu terus dilakukan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kalimantan Tengah. Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan.

Ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mencakup:

- a. Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi;
- d. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi;
- e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi; dan
- f. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi.

Terkait Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

Pengembangan Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah sangat terkait dengan RTRW Setda Provinsi Kalimantan Tengah dimana Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan memiliki fungsi utama sebagai penunjang bidang kesejahteraan rakyat, perencanaan strategis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pembinaan mental spiritual, pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis :

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka dapat ditentukan isu strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah lima tahun ke depan.

Isu-isu Strategis pada rancangan awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 merupakan bagian tahapan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya untuk dilaksanakan dan

diselesaikan secara berkesinambungan. Prioritas utama pada penentuan isu-isu strategis antara lain Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Tengah. Penentuan isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026 yang harus ditangani secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis daerah yaitu :

1. Masih rendahnya koordinasi dan fasilitasi dalam bidang kesejahteraan rakyat;
2. Belum berakhirnya pandemi covid-19 yang mengakibatkan tertundanya kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat.

Bab 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu lima tahun ke depan.

Tujuan yang ditetapkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2021-2026 yaitu :

Terwujudnya Fasilitas Bidang Kesejahteraan Rakyat Dan Peningkatan Kualitas Beribadah

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat
2. Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Dan Kualitas Beribadah

Tujuan dan Sasaran jangka menengah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

Bab 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta tujuan dan sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah maka diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat dan berkesinambungan. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan mengacu kepada rancangan awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Strategi dan kebijakan ini ditujukan untuk menjawab tantangan dan dinamika pembangunan di daerah.

Adapun strategi Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang urusan kesejahteraan rakyat.
2. Meningkatkan kualitas SDM penunjang urusan kesejahteraan rakyat.
3. Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana spiritual.
4. Meningkatkan fasilitasi bina spiritual.
5. Meningkatkan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar
6. Meningkatkan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar

Sedangkan arah kebijakan yang akan diambil dan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Manajemen Akses Data dan Informasi Urusan Kesejahteraan Rakyat.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat.
3. Peningkatan Kompetensi SDM Melalui Diklat dan Bimtek.
4. Pembinaan Pengembangan Karier SDM Secara Reguler.
5. Peningkatan Kualitas Pembinaan Sarana Prasarana Spiritual dan Kelembagaan Bina Spiritual

6. Peningkatan Pengelolaan Hibah Sarana Prasarana Spiritual dan Kelembagaan Bina Spiritual
7. Peningkatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.
8. Penguatan Peran Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.
9. Peningkatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.
10. Penguatan Peran Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.

Strategi dan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai visi, misi, tujuan serta sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah dapat digambarkan dalam Tabel 5.1 sebagai berikut :

Bab 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah provinsi Kalimantan Tengah yang ada pada program pembangunan ranwal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Program ada 2 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan ada 9 yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
8. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
9. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan indikatif disajikan menggunakan tabel 6.1 sebagai berikut :

Bab 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam upaya melaksanakan tugas secara efektif dan efisien guna membantu Sekretaris Daerah menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang-bidang Kesejahteraan Rakyat telah ditetapkan indikator kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, sebagaimana Tabel 7.1 berikut :

Bab 8

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 merupakan pedoman dan arahan bagi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021 – 2026. Renstra ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Renja serta digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah 2021 – 2026 tentunya akan terwujud dengan dukungan dari seluruh Stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pihak Swasta, LSM dan Masyarakat.

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah akan bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, tujuan dan sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan yang tertuang pada Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026.

Plt. KEPALA BIRO,

AHMAD PAHRUKA, S.Pd, M.MP

Pembina

NIP. 197302121999091001

Tabel. 2.2.2

Barang Milik Daerah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah

N	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Biro Kesejahteraan Rakyat	294	4,026,811,234.67
	KOMPUTER	90	761,348,500.00
	P.C Unit	26	335,742,500.00
	Lap Top	5	73,920,000.00
	Note Book	18	228,755,000.00
	Monitor	2	2,630,000.00
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	37	113,976,000.00
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	1,950,000.00
	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	4,375,000.00
	ALAT ANGKUTAN	23	2,483,004,034.00
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6	2,015,541,690.00
	Pick Up	1	157,912,000.00
	Sepeda Motor	16	309,550,344.00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	165	681,307,936.67
	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	7	28,823,000.00
	Mesin Ketik Elektronik/Selektik	3	14,940,000.00
	Mesin Fotocopy Double Folio	1	60,500,000.00
	Lemari Besi/Metal	5	16,184,000.00
	Rak Kayu	1	1,175,000.00
	Filing Cabinet Besi	12	33,552,000.00
	Brandkas	2	29,950,000.00
	Lemari Kaca	3	6,740,000.00
	Lemari Makan	1	2,770,000.00
	Overhead Projector	1	34,134,000.00
	Papan Tulis	2	1,000,000.00
	Alat Kantor Lainnya	4	60,691,284.00
	Meja Kerja Kayu	4	3,140,000.00
	Kursi Kayu	29	14,571,666.67
	Meja Rapat	3	27,100,000.00
	Meja 1/2 Biro	15	20,718,750.00
	Kursi Rapat	32	28,570,000.00
	Kursi Tamu	4	19,900,000.00
	Meubeler lainnya	8	19,154,000.00
	Televisi	10	46,375,000.00
	Loudspeaker	6	135,040,736.00
	Sound System	4	31,610,250.00
	Compact Disc	1	800,000.00
	Microphone Table Stand	2	3,512,250.00
	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	36,006,000.00
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1,550,000.00
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	2,800,000.00
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	16	101,150,764.00
	Microphone/Wireless MIC	3	29,212,000.00
	Microphone/Boom Stand	4	10,604,764.00
	Camera Electronic	2	46,400,000.00
	Layar Film/Projector	1	9,750,000.00
	Handy Talky (HT)	6	5,184,000.00
	TOTAL	294	4,026,811,234.67

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Fasilitas Bidang Kesejahteraan Rakyat Dan Peningkatan Kualitas Beribadah		Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	77,97 %	78,02 %	78,07 %	78,12 %	78,17 %
		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Keterlaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat	92%	94%	96%	98%	100%
		Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Dan Kualitas Beribadah	Jumlah Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Dan Meningkatkan Kualitas Beribadah	11 Kegiatan	12 Kegiatan	13 Kegiatan	14 Kegiatan	16 Kegiatan

		4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	5 kegiatan	5	205.590.000,000	5	209.513.800,000	6	213.540.695,000	6	239.011.350,000	6	249.420.850,000	6	249.420.850,000	Biro Keasa.	
		4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Keseghtraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesra Pelayanan Dasar	3 kegiatan	3	600.000,000	3	800.000,000	4	1.000.000,000	4	1.200.000,000	5	1.400.000,000	5	1.400.000,000	Biro Keasa.	
		4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Keseghtraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesra Non Pelayanan Dasar	3 kegiatan	3	700.000,000	3	900.000,000	3	1.100.000,000	4	1.300.000,000	5	1.500.000,000	5	1.500.000,000	Biro Keasa.	
		Jumlah					209.107.080,000		213.475.865,138		217.948.223,212		244.094.983,222		255.015.368,768		255.015.368,768		

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : KALTENG MAKIN BERKAH			
MISI V : Meneguhkan Kalteng Yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Fasilitas Bidang Kesejahteraan Rakyat Dan Peningkatan Kualitas Beribadah	1. Meningkatkan Pelayanan Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat 2 Meningkatkan Kualitas SDM Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat	1 Peningkatan Manajemen Akses Data dan Informasi Urusan Kesejahteraan Rakyat 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat 1 Peningkatan Kompetensi SDM Melalui Diklat dan Bimtek 2 Pembinaan Pengembangan Karier SDM Secara Reguler
	2 Meningkatkan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Dan Kualitas Beribadah	1 Meningkatkan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual 2 Meningkatkan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 3 Meningkatkan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1 Peningkatan Kualitas Pembinaan Sarana Prasarana Spiritual dan Kelembagaan Bina Spiritual 2 Peningkatan Pengelolaan Hibah Sarana Prasarana Spiritual dan Kelembagaan Bina Spiritual 1 Peningkatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 2 Penguatan Peran Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 1 Peningkatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 2 Penguatan Peran Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

Tabel 2.3.1

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Biro	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Biro Kesra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun ke-						
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Jumlah Terkirrimnya surat-surat dinas	95%	1500 Surat	1500 Surat	1500 Surat	1500 Surat	2000 Surat	2000 Surat	3000 Surat	3000 Surat	100%	100%	100%	100%	100%		95	96	97	98	99	
2	Jumlah jasa administrasi keuangan	99%	7 Macam	7 Macam	7 Macam	7 Macam	7 Macam	7 Macam	7 Macam	7 Macam	100%	100%	100%	100%	100%		95	96	97	98	99	
3	Jumlah peralatan yang diperbaiki	100%	10 Unit	10 Unit	10 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	30 Unit	30 Unit	100%	100%	100%	100%	100%		95	96	97	98	99	
4	Jumlah alat tulis kantor	95%	16 Macam	16 Macam	16 Macam	16 Macam	20 Macam	20 Macam	30 Macam	40 Macam	100%	100%	100%	100%	100%		95	96	97	98	99	
5	Jumlah barang cetakan dan penandaan	100%	500 Buah	500 Buah	500 Buah	500 Buah	500 Buah	800 Buah	800 Buah	800 Buah	100%	100%	100%	100%	100%		95	96	97	98	99	
6	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100%	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	100%	100%	100%	100%		95	96	97	98	99	
7	Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99%	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	20 OT	20 OT	20 OT	100%	100%	100%	100%	100%		95	96	97	98	99	
8	Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	99%	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	20 OT	20 OT	20 OT	100%	100%	100%	100%	100%		95	96	97	98	99	
9	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi internet	99%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	100%		95	96	97	98	99	
10	Jumlah Monitoring dan evaluasi program	98%	20 OT	20 OT	20 OT	20 OT	20 OT	25 OT	25 OT	25 OT	100%	100%	100%	100%	100%		95	96	97	98	99	
11	Jumlah orientasi tugas dan fungsi SKPD terkait	97%	25 OT	25 OT	25 OT	25 OT	25 OT	30 OT	30 OT	30 OT	100%	100%	100%	100%	100%		95	96	97	98	99	
12	Jumlah laporan keuangan	100%	20 Dok	20 Dok	20 Dok	20 Dok	20 Dok	20 Dok	20 Dok	20 Dok	100%	100%	100%	100%	100%		95	96	97	98	99	
13	Jumlah laporan keuangan masyarakat tentang keluarga sejahtera	98%	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	100%	100%	100%	100%	100%		95	96	97	98	99	
14	Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	100%	65 Buku	65 Buku	65 Buku	65 Buku	65 Buku	65 Buku	65 Buku	65 Buku	100%	100%	100%	100%	100%		95	96	97	98	99	
15	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	100%	12 Buku	12 Buku	12 Buku	12 Buku	12 Buku	15 Buku	15 Buku	15 Buku	100%	100%	100%	100%	100%		95	96	97	98	99	
16	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi kesadaran masyarakat tentang keluarga sejahtera	98%	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	100%	100%	100%	100%	100%		95	96	97	98	99	
17	Jumlah koordinasi dan fasilitasi program keluarga sejahtera	98%	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	100%	100%	100%	100%	100%		95	96	97	98	99	
18	Jumlah koordinasi dan konsultasi program kesehatan KB	99%	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	100%	100%	100%	100%	100%		95	96	97	98	99	
19	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Generasi Pemuda	98%	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	100%	100%	100%	100%	100%		95	96	97	98	99	
20	Jumlah Koordinasi Organisasi Kemudaraan	100%	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	100%	100%	100%	100%	100%		95	96	97	98	99	
22	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi masalah kemiskinan dan anak terlantar	100%	20 OT	20 OT	20 OT	20 OT	20 OT	25 OT	25 OT	25 OT	100%	100%	100%	100%	100%		95	96	97	98	99	
21	Jumlah koordinasi kualitas kesejahteraan perempuan	100%	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	100%	100%	100%	100%	100%		95	96	97	98	99	
22	Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan tindak pidana.	100%	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	15 OT	100%	100%	100%	100%	100%		95	96	97	98	99	

[illegible]

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	10
1	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	77,82%		77,97%	78,02%	78,07%	78,12%	78,17%	78,17%
2	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat	90%		92%	94%	96%	98%	100%	100%
3	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	11 Kegiatan		11	12	13	14	16	16
4	Nilai Kerjasama	78,57 Angka		78,71	78,78	78,85	78,92	78,99	78,99
5	Nilai Kesenjangan	78,37 Angka		78,49	78,55	78,61	78,67	78,73	78,73
6	Nilai Toleransi	76,52 Angka		76,65	76,70	76,80	76,90	77	77

TABEL 2.3.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21
Belanja Langsung	16,270,458,000	27,250,000,000	22,525,000,000	5,388,378,743	-	13,435,452,228	26,229,132,185	22,493,738,080	5,388,378,743		0.83	0.96	0.999	1.00		-0.31	-0.26
Belanja Tidak Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	16,270,458,000	27,250,000,000	22,525,000,000	5,388,378,743	-	13,435,452,228	26,229,132,185	22,493,738,080	5,388,378,743		0.83	0.96	0.999	1.00		-0.31	-0.26